

Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
email: rosalindajati11@gmail.com

Abstract

Confiscation of assets is a form of eradication in reducing the number of corruption crimes in Indonesia, the provisions of which are in the Criminal Code (KUHP) regarding additional crimes. The application of confiscation of assets has been carried out in many cases of corruption but the amount of assets seized tends to be incompatible with or commensurate with the amount of state financial losses that have been corrupted. In this study, the focus is on the application of confiscation of assets in the eradication of Corruption Crime in Indonesia and ideally setting the confiscation of assets in the eradication of Corruption in the future. Normative legal research is a type of research used by the author. To obtain the results of the research carried out by qualitative analysis. The problem approach used by the writer in conducting this research is an invitation-friendly approach and a case approach. This research is indispensable because it provides a new building for eradicating corruption using methods that monitor money and follow the track record of corruption resulting from corruption. The next stage is by seizing wealth, the assets which are seized are known to be a criminal act committed by a crime that cannot feel the crime that was committed. The method of proof is deemed easier, because the concept of loading proof is reversed.

Keywords: *corruption; confiscation of assets; additional crime.*

Abstrak

Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia yang ketentuannya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Dalam penelitian ini fokus terhadap penerapan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode *follow the money* yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Metode pembuktiannya dirasa lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembebanan pembuktian terbalik.

Kata Kunci: *korupsi; perampasan aset; pidana tambahan.*

A. Pendahuluan

Kata korupsi memiliki asal dari bahasa (*corruption*) Latin, Inggris (*corruption*), serta Belanda (*corruptive*), arti sesungguhnya menunjuk terhadap tindakan tidak jujur, busuk,

rusak yang dikaitkan dengan keuangan.¹ Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang fenomenal sekarang ini, bukan hanya memberikan kerugian terhadap keuangan Negara tetapi melanggar hak-hak sosial rakyat juga. Dalam hal mengganti kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi dibutuhkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan kekayaan atas terdakwa yang terbukti berbuat tindak pidana.

Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Pada pertengahan tahun 2020 dihebohkan dengan tertangkapnya Maria Pauline Lumowa yang merupakan buron selama 17 tahun dalam kasus pencurian kas Bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) di Kebayoran Baru sejumlah 1,7 triliun melalui L/C fiktif. Mabes Polri telah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku kasus pembobolan Bank BNI tersebut senilai 132 miliar.² Kemudian dilanjutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi Dirgantara Indonesia, KPK sudah merampas aset properti serta memblokir rekening mantan Asisten Dirut bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Inonesia Irzal Rinaldi Zailani serta mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso. KPK sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening serta merampas aset properti yang memiliki jumlah kira-kira Rp18,6 miliar. Perampasan yang dilaksanakan KPK berhubungan pada penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas penjualan serta pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Berdasarkan kasus tersebut, Irzal serta Budi Santoso dan beberapa pihak lainnya dicurigai sudah menjadikan keuangan Indonesia rugi senilai Rp205,3 miliar serta kira-kira Rp300 miliar.³

Berdasarkan kedua kasus tersebut ditemukan bahwa terdapat kesulitan dalam hal merampas harta kekayaan hasil tipikor. Mekanisme perampasan aset menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana, yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku serta memposisikan pelaku ke penjara serta hanya memposisikan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif guna menghapus jumlah kejahatan.⁴ Adanya

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 1992, hlm. 2.

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.

³ <https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186-miliar>, diakses tanggal 23 Oktober 2020.

⁴ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Volume 6. Nomor 1, Juni 2015, hlm. 24.

penyitaan kekayaan adalah suatu bentuk upaya guna memberantas korupsi di Indonesia yang ketentuannya telah diatur pada KUHP tentang pidana tambahan.

Penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode *follow the money* yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Komitmen serta kerja sama atas pemberantasan korupsi bisa diamati yaitu adanya UNCAC yang diresmikan di 2003 serta Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi ini dari UU Nomor 7 Tahun 2006.⁵ Selain UNCAC terkait Anti Korupsi 2003, Indonesia telah menetapkan *Mutual Legal Assistance* dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2006 terkait Bantuan Timbal Balik terhadap Masalah Pidana. Aturan ini merupakan instrumen yang dibutuhkan pada hal bantuan timbal balik dengan negara lain dimana diduga harta milik negara hasil tipikor itu berada.⁶

Suatu upaya kongkrit yang dilaksanakan pemerintah pada langkah pembaharuan itu ialah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di tahun 2008.⁷ RUU Perampasan Aset bertujuan guna mendapatkan harta kekayaan hasil tindak pidana, tidak pada pelaku tindak pidana. RUU ini sangat dibutuhkan dalam merampas aset hasil kejahatan korupsi tanpa bergantung pada kehadiran para pelaku. Di masa mendatang apabila RUU ini disahkan, maka aparat penegak hukum tidak harus bergantung pada kehadiran para pelaku korupsi. Metode pembuktiannya dirasa lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian.

Menarik untuk dikaji lebih dalam serta dianalisa mengenai perampasan aset dari hasil kejahatan korupsi guna menekan angka korupsi di Indonesia. Diharapkan dalam kajian ini dikemudian hari dapat memecahkan suatu kebuntuan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di masa mendatang. Dengan banyaknya permasalahan dalam hal perampasan

⁵ Ridwan Arifin, "ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERAMPASAN ASET DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DAN *ASEAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (AMLAT)*", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 39.

⁶ Beni Harmoni Harefa, "Upaya Pengembalian Aset Negara (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri", (Tesis), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

⁷ Deypend Tommy Sibuea, R.B Sularto, Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 5

aset hasil kejahatan korupsi, maka penelitian ini secara khusus mengangkat tema “Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ? dan Kedua, bagaimana idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang ?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Berdasarkan Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji penelitian hukum normatif dinamakan pula “Penelitian Kepustakaan”.⁸ Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilaksanakan secara meneliti bahan pustaka sekunder saja. Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang dipakai penulis guna melakukan penelitian ini dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan secara menelaah semua regulasi serta Undang-Undang yang berkaitan pada isu hukum yang menjadi perbincangan. Lalu pada Pendekatan Kasus menggunakan *ratio decidendi*, yakni alasan hukum yang dipakai oleh hakim guna mencapai putusannya.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi kebanyakan yang melakukannya adalah pihak yang berpendidikan, memberikan pengaruh pada lingkungan masyarakat, hingga para politisi yang pada langkah menyamarkan, menyembunyikan, ataupun menghanguskan barang bukti dan hasil korupsi, banyak sekali yang menyimpan serta melarikan hasil korupsinya di negara asing.¹⁰ Sejauh ini dalam praktik hukum yang ada di Indonesia untuk memberantas korupsi yang memiliki tujuan guna menormalkan kerugian negara yang diambil oleh pelaku masih belum efektif karena terdapatnya kompetensi pelaku guna melarikan ataupun mengalihkan hasil kejahatan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 13-14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 158.

¹⁰ Rizi Rizki Deli, “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang”, *Lex Administratum*, Volume IV, Nomor 4, April 2016, hlm. 3.

ke negara asing serta bisa juga pelakunya bersembunyi di negara asing serta tidak bisa diekstradisi lagi ke Indonesia.¹¹ Hadirnya lembaga penegak hukum yaitu KPK yang diberi perintah untuk memberantas korupsi dengan cara berkesinambungan, intensif, serta profesional dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang mempunyai sifat independen, yang ketika melakukan tugas serta wewenang bebas dari kekuasaan apapun. Pemaparan UU mengatakan jika peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang artinya mendorong supaya langkah pembasmian korupsi oleh lembaga yang sudah terdapat sebelumnya menjadi lebih efisien serta efektif. Berikut hasil rekapitulasi yang diperoleh dari lembaga KPK yang menunjukkan bahwa angka kejahatan korupsi semakin hari semakin meningkat. Data ini merupakan data terbaru dari tahun 2016 - 2020 yang berisi sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.¹²

Penindakan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelidikan	96	123	164	79	78
Penyidikan	99	121	199	63	43
Penuntutan	76	103	151	73	40
Inkracht	71	84	104	87	70
Eksekusi	81	83	113	78	69
Total	423	514	736	380	300

¹¹ Try Putra D. N. Kuku, "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 4, Oktober-Desember 2020, hlm. 4.

¹² <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses tanggal 6 Desember 2020.

Tabel 2. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Inkracht (Perkara Berkekuatan Hukum Tetap)¹³

INKRACHT	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadilan Negeri	43	71	94	113	52
Pengadilan Tinggi	13	5	10	11	4
Mahkamah Agung	14	8	5	18	14
Jumlah	70	84	109	142	70

Berdasarkan data-data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa terjadi peningkatan serta terlihat sektor dan bidang mana saja yang rawan dilakukannya tindak pidana korupsi. Dibutuhkan sanksi serta regulasi yang tepat untuk menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Dalam hal mengganti kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi tersebut hukuman tambahan berupa perampasan aset dirasa tepat apabila dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi. Instrumen ini adalah suatu langkah guna memerangi tingginya angka korupsi di Indonesia.

Perampasan adalah langkah hukum pada lingkup eksekusi/melakukan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap guna menyita harta kejahatan korupsi kemudian menjadi harta negara.¹⁴ Menurut Reksodiputro memaparkan jika *legal concept* perampasan harta/aset berdasarkan hukum pidana Indonesia serta Belanda merupakan sebuah sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim bersamaan dengan sanksi pokok.¹⁵ Efi Laila Kholis mengemukakan perbedaan antara pidana tambahan dan pidana pokok.

¹³<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, diakses tanggal 6 Desember 2020.

¹⁴Ramelan, dkk., Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 173.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, "Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, *Legal Opinion* (sebagai narasumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset), Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.

Ketidaksamaanya yaitu: Pemberian salah satu jenis hukuman pokok yaitu kewajiban. Dan pemberian hukum tambahan memiliki sifat fakultatif. Jika pada sebuah persidangan terbukti terdakwa melakukan kesalahan dengan cara meyakinkan serta sah, untuk itu hakim wajib memberikan salah satu hukuman pokok selaras pada jenis serta batas maksimum melalui rumusan tidak pidana yang dilakukan itu. Sifat imperatif bisa diamati dalam rumusan tindak pidana, yang mana ada 2 kemungkinan yakni diberikan salah satu hukuman pokok dan akhirnya hakim bersedia atau tidak bersedia wajib memberikan hukuman selaras rumusan itu ataupun bisa pula kejahatan yang diancam oleh dua ataupun lebih jenis hukuman pokok dan akhirnya hakim bisa menentukan hanya salah satunya.¹⁶

Pemberian hukuman pada koruptor untuk memunculkan efek jera, mengembalikan kerugian negara, dan langkah pengantisipasi supaya rakyat tidak berani berbuat kejahatan korupsi.¹⁷ Perampasan termasuk pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP.

Alur mekanisme perampasan aset terpidana korupsi yaitu pertama, satgas pelacakan aset melakukan pelacakan terhadap aset-aset milik tersangka dan atau pihak terkait (tahap penyidikan); Setelah didapatkan data aset selanjutnya diverifikasi dan apabila memang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik; Kemudian benda sitaan tersebut dimuat dalam berkas perkara dan dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi/TPPU, dan dimuat dalam amar tuntutan untuk dirampas untuk negara atau dirampas untuk negara untuk dikompensasikan dengan pembayaran pidana uang pengganti; Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekusi akan melakukan pelaksanaan putusan pengadilan dengan cara untuk BB dalam bentuk uang tunai atau uang dalam rekening disetorkan ke kas negara, sedangkan apabila BB dalam bentuk aset maka akan dilakukan pelelangan dan hasilnya disetorkan ke kas negara. Apabila setelah dilelang tidak laku lelang, maka sesuai ketentuan PMK Nomor 08 tahun 2018, Jaksa akan mengusulkan terhadap aset tersebut dilakukan penetapan status penggunaan kepada APH atau instansi yang membutuhkan atau Hibah kepada Pemda yang membutuhkan.¹⁸ Penerapan perampasan

¹⁶ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010) hlm. 14-15.

¹⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

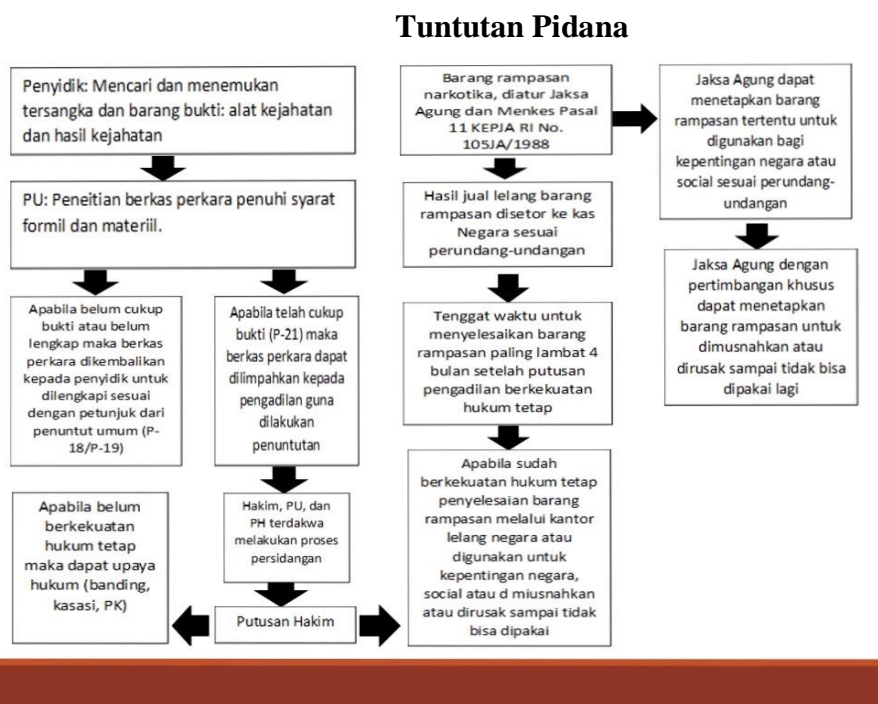
¹⁸ Wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Siswandono, Via Zoom, Pada tanggal 9 Desember 2020.

kekayaan hasil korupsi yang tertuang pada UU Pemberantasan Tipikor dilakukan menggunakan dua cara. Dua cara yang dimaksud adalah:

a. Perampasan Aset Hasil Tipikor dari Jalur Tuntutan Pidana

Perampasan aset hasil tipikor sangatlah tergantung terhadap kompetensi penuntut hukum guna membuktikan kesalahan pelaku di hadapan persidangan dan juga untuk membuktikan jika dalam tindak pidana itu ada hasil tindak pidana yang didakwakan. Konsep tersebut disebut dengan perampasan aset sesuai dengan kesalahan pelaku, yaitu penuntutan kasus kejahatan itu. Konsep *Conviction Based Assets Forfeiture* bisa dilihat pada Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang sudah menjelaskan batasan kekayaan apa saja yang bisa dilakukan penyitaan. Aset ataupun benda yang sudah dirampas selanjutnya dilaksanakan perampasan negara apabila termasuk hasil dari tindak kejahatan seperti ketentuan pada pasal 46 ayat (2) KUHAP. Perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan yang mana hakim selain memberikan sanksi pokok bisa juga memberikan sanksi tambahan. Sanksi tambahan yang diberikan hakim pada kapasitasnya harus saling berhubungan pada pemulihan kerugian keuangan negara dari perampasan aset.

Gambar 1. Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset Hasil Tipikor Dari Jalur



b. Perampasan Aset Hasil Tipikor Dari Gugatan Perdata

Ketentuan perampasan harta kekayaan dari gugatan perdata dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Mengenai Pemberantasan Korupsi memaparkan bahwa intinya apabila penyidik mendapatkan serta menyatakan 1 ataupun lebih unsur Tipikor tidak ada bukti cukup, dan dengan nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara, kemudian penyidik bisa cepat-cepat memberikan dokumen kasus hasil penyidikan itu pada Jaksa Pengacara Negara guna dilaksanakan gugatan perdata ataupun diberikan pada instansi yang dirugikan guna mengajukan gugatan.¹⁹ Adanya masalah yang belum tersentuh dalam peraturan tersebut yakni mengenai pelaku tidak didapati, pelaku menjadi gila, pelaku meninggal dunia, tidak ada ahli waris ataupun ahli guna dilaksanakan gugatan perdata dan sudah jelas terdapatnya kerugian keuangan negara, serta pada hal harta kekayaan itu tidak di posisikan pada sita pidana. Masalah hukum yang masih belum terjamak itu tidak bisa dituntaskan dengan tahapan pidana karena tahapan pidana adalah proses *in personam* yang ada dalam diri tersangka.²⁰ Perampasan aset dari gugatan perdata adalah jalan alternatif jika perampasan harta kekayaan dari gugatan pidana tidak berjalan lancar.

Baik dari jalur perdata ataupun pidana, dua-duanya membutuhkan fungsi serta peran jaksa, yang mempunyai wawasan memadai dan memiliki pencapaian yang maksimal dalam menggunakan sudut pandang pengendalian kerugian Negara pada langkah mengembalikan kerugian Negara yang merupakan korban Tipikor.²¹ Kekosongan hukum yang masih ada mengenai masalah perampasan harta kekayaan dengan cara perdata harus segera diisi dengan memberikan peraturan hukum yang tepat contohnya, terhadap harta kekayaan tersangka yang meninggal dunia serta tidak didapatkan ahli warisnya dinyatakan merupakan “aset tidak memiliki tuan” guna selanjutnya oleh jaksa yang dibuat rugi memohonkannya ke pengadilan supaya ditentukan menjadi harta milik negara.²²

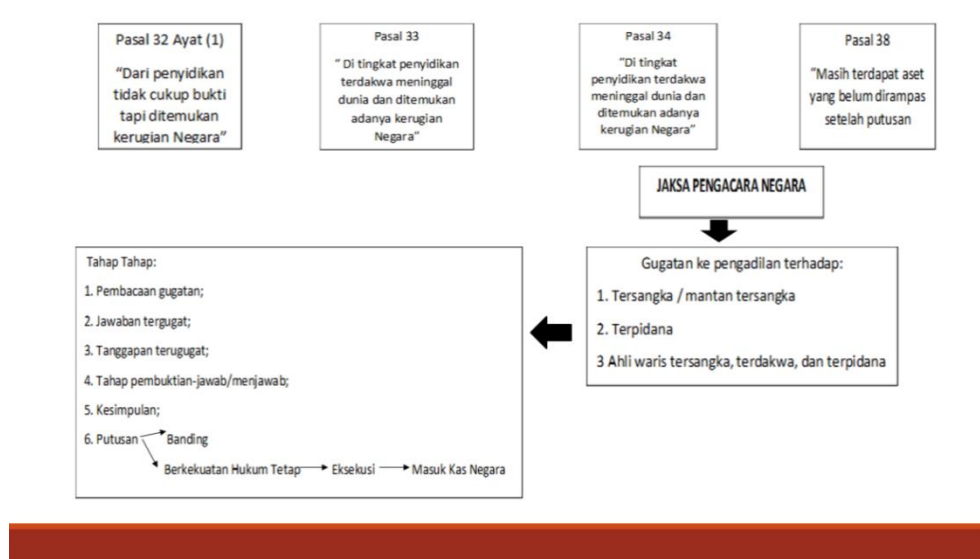
¹⁹ Melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38B Ayat (2) diatur pula proses penyitaan dan perampasan.

²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 23.

²¹ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 13.

²² Imelda F.K. Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45, Nomor 4, Oktober 2016, hlm. 8.

Gambar 2. Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Tuntutan Perdata



Idealnya Pengaturan Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Tindakan pengambilan harta kekayaan yang telah ada dalam sejarah aturan UU Indonesia yakni yang pertama pada Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 terkait Pemeriksaan, Pengusutan, serta Penuntutan, tindak pidana korupsi serta Pemilikan Harta Kekayaan. Peraturan itu memiliki arti harta benda kecuali aset kejahatan bisa diambil yakni aset suatu badan ataupun seseorang yang secara sengaja tidak dijelaskan olehnya; aset individu yang sesudah diperiksa dinilai tidak seimbang dengan penghasilan pekerjaannya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya.²³ Pengaturan perampasan aset hasil Tipikor tertuang pada hukum nasional yang terdiri:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sanksi korupsi yang berasal dari UU No. 31 tahun 1999 Terkait Tipikor sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001, bahwa UU tersebut dirancang khusus guna mengatur

²³ Maggie Regina Imbar, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" Lex Crimen, Volume IV, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm.2.

hukum pidana khusus saja.²⁴ Berdasarkan aturan UU itu guna melakukan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi melalui 2 pendekatan yakni melalui jalur perdata serta jalur pidana.

b. UU No. 8 Tahun 2010 Terkait Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Apabila tidak terdapat individu yang mengatakan keberatan pada waktu 20 tahun dimulai dimulai tanggal penghentian sementara pembayaran, PPATK menindaklanjuti aset yang patut dicurigai adalah hasil kejahatan itu pada penyidik guna dilaksanakan penyidikan.²⁵ Berdasarkan hal yang dicurigai merupakan pelaku kejahatan tidak didapatkan pada waktu 30 hari, penyidik bisa melakukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan aset merupakan harta milik negara ataupun dikembalikan ke pemilik. Pengadilan wajib menentukan pada kurun waktu seminggu.

c. *Mutual Legal Assistance*

Mutual Legal Assistance lahir selaras pada perintah dari UNCAC yaitu negara penandatanganan diharuskan mempunyai hubungan kerjasama Internasional untuk memusnahkan korupsi.²⁶ MLA sesuai pemaparan Bismar Nasution, yaitu nafas serta alat ukur hukum yang sangatlah bermanfaat melalui langkah pengembalian harta yang diambil oleh pelaku korupsi oleh sebab MLA adalah permintaan bantuan masalah hukum pidana berkenaan pada pemeriksaan, penuntutan, serta penyidikan pada sidang pengadilan dengan ketetapan peraturan undang-undang negara diminta.²⁷ Guna menghapus tindak kejahatan adanya sejumlah kerjasama internasional atau MoU salah satunya yaitu perjanjian *Mutual Legal Assistance*.²⁸ Merupakan perjanjian yang bisa diciptakan dengan cara multilateral ataupun bilateral. Terkait hal itu Indonesia sudah memiliki 1 perjanjian multilateral serta 4 perjanjian bilateral serta 1 *Mutual Legal Assistance*.

²⁴ Kausar Dwi Kusuma, "Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*", (Jurnal), UNIVERSITAS BRAWIJAYA, Malang 2013, hlm. 9.

²⁵ Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁶ *United Nations Conventions of Against Corruption*, artikel 42 ayat (2).

²⁷ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hlm. 122.

²⁸ Yunus Husein, "Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi", Semarang, 21-22 Mei 2008, hlm. 18.

Mutual Legal Assistance memiliki ruang lingkup yang lebih serta jangkauan lebih luas yang mencakup pencarian bukti yang berhubungan pada kejahatan yang sedang diperiksa sampai pelaksanaan putusan.²⁹ MLA belum tentu akan berjalan secara optimal apabila tidak diiringi dengan langkah *real* dari pemerintah dalam mempergunakan instrumen ini, perjanjian bilateral yang dilaksanakan Indonesia memperlihatkan jika peran pemerintah dalam upaya memberantas korupsi melalui instrumen ini belum maksimal dibandingkan dengan negara-negara lain.

d. UNCAC

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2006 terkait Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. UNCAC 2003 sudah digunakan oleh sidang Majelis Umum PBB pada resolusinya No 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, serta terbuka guna ditanda tangani di Meksiko sejak 9-11 Desember 2003. Sebelum UNCAC 2003, terdapat dua konvensi yang diluncurkan oleh negara yang termasuk pada Uni Eropa yakni *Criminal Law Convention on* serta *Civil Law Convention on Corruption*, yang sudah di ratifikasi oleh dua puluh satu negara Uni Eropa.³⁰ Konvensi tersebut adalah landasan pemerintah pada langkah pencegahan serta pemberantasan Tipikor di Indonesia yang bertambah banyak. StAR adalah program bersama yang diluncurkan oleh Bank Dunia serta PBB terkhusus UNODC guna menumbuhkan kerja sama internasional untuk menggunakan langkah pemulihan harta kekayaan hasil korupsi, merupakan suatu terobosan pada hukum internasional yang menentukan landasan terkait pemulihan harta kekayaan hasil korupsi pada negara berkembang.³¹

e. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tipikor Di Masa Mendatang Dari RUU Perampasan Aset

Penerapan ketentuan perampasan aset hasil dari Tipikor tanpa pemidanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penerapannya dikarenakan penstabilan kerugian negara dari perampasan harta kekayaan hasil Tipikor tanpa melalui tuntutan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan masalah hukum yang baru. Pembentukan rezim *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah suatu upaya guna memberantas masalah pengembalian

²⁹United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, artikel 18 ayat (3).

³⁰ I Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", Kertha Patrika, Volume 33, Nomor 1, Januari 2008, hlm.6.

³¹ Malto S. Datuan, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", USU law journal, Volume 5, Nomor 2, April 2017, hlm.5.

harta korupsi.³² Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset lebih menitikberatkan dalam system *NCB Asset Forfeiture* yang bisa dijadikan alat yang sangat bermanfaat guna merampas serta mengambil alih kekayaan dari para koruptor di Indonesia. Minimalnya terdapat sejumlah kegunaan NCB guna mempermudah aparat hukum guna tahap pengembalian aset para koruptor ialah:³³

- a. NCB tidak berkaitan pada suatu kejadian dan kemudian perampasan bisa lebih mudah diminta pada pengadilan dibandingkan dengan Criminal Forfeiture.
- b. NCB adalah tahap gugatan pada harta kekayaan. Terdakwa tersebut tidaklah relevan di sini dan kemudian meninggalnya, hilangnya, kaburnya koruptor ataupun bahkan terdapatnya putusan bebas bagi koruptor itu tidak menjadi masalah NCB.
- c. NCB sangatlah bermanfaat untuk perkara-perkara yang mana penuntutan secara pidana memperoleh hambatan ataupun tidak memungkinkan guna dilaksanakan.³⁴

Latar belakang terbentuknya Rancangan Undang-Undang perampasan aset ditinjau pada perspektif konsederans yang memaparkan jika mekanisme serta sistem yang mengatur tentang perampasan harta kekayaan Tipikor sekarang ini belum bisa menunjang langkah penegakan hukum yang memiliki keadilan serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. RUU perampasan aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkokoh sistem hukum melalui perampasan harta kekayaan tanpa putusan pengadilan dengan perampasan aset mempunyai terobosan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan sistem *Non Conviction Based Forfeiture*. Mekanisme dalam sistem ini yaitu dapat merampas semua harta kekayaan yang dicurigai adalah hasil dari Tipikor serta kekayaan lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat kejahatan, terkhusus yang merupakan pada kelompok kejahatan sangat berat, terdapatnya sistem itu mungkin akan menjadikan lebih efektif sebab perampasan dari tuntutan pidana dianggap membutuhkan

³² Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 24-25.

³³ Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 168.

³⁴ Stefan D. Cassela, "*The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*", disampaikan di *25th Cambridge International Symposium on Economic Crime*, 7 September 2007.

waktu yang sangat lama. Terkait tindak pidana korupsi, proses pembuktian menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewjislast*) oleh terdakwa didalam persidangan, terkait mengenai pembuktian dalam prosedur pengembalian aset maka pihak penyidik atau KPK melakukan proses:

- a. Pelacakan Aset;
- b. Pembekuan Aset;
- c. Penyitaan Aset.³⁵

Pembalikan beban pembuktian hanya bisa digunakan pada kesalahan individu yang dicurigai berbuat tipikor serta kekayaan milik tersangka yang belum didakwakan, namun dicurigai memiliki asal dari tipikor. Oleh karena walaupun pengungkapan dan pembuktian terhadap kasus korupsi relatif sedemikian sulit, tetapi dari kacamata hukum pembuktian penanganan kasus korupsi dengan cara mendasar tidak diperbolehkan berlawanan dengan HAM, instrumen hukum internasional serta nasional, serta lainnya.³⁶ Dalam hal pembuktian terbalik guna mengambil aset yang dicurigai bersumber melalui korupsi dari *Civil Recovery* bukanlah suatu penyelewengan Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa, sebab yang harus dibuktikan yaitu asal usul asetnya bahwa pemilik aset itu diposisikan pada kedudukan sebelum menjadi kaya. Tetapi dalam tahap pembuktian terbalik seringkali pemilik aset tidak bisa membuktikan asetnya. Ketidakmampuan seseorang yang terkait guna membuktikan keabsahan asetnya tidak bisa digunakan bukti untuk menuntut seseorang tersebut pada perkara tipikor. Supaya penegakan hukum pada tipikor, benar-benar bisa diwujudkan dan mampu mencapai tujuannya yang hakiki, yakni pengembalian kerugian negara, maka kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi harus diperkuat dari sanksi pidana tambahan yang memiliki sifat fakultatif, menjadi bagian dari hukuman pokok, yang memiliki sifat imperatif atau harus diterapkan oleh Majelis Hakim pada pelaku tipikor.³⁷ Dibutuhkan reformasi penggantian dalam kedudukan pidana perampasan aset menjadi pidana pokok akan

³⁵ Andi Saputra, "Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Interasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*", *JOM Fakultas Hukum*, Volume V, 2 Oktober, 2018, hlm. 10.

³⁶ Erwin Ogi, "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan", *Lex et Societatis*, Volume III, Nomor 4, Mei 2015, hlm. 2.

³⁷ Agus Pranoto, "Kajian yuridis mengenai perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Legalitas*, Volume X, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 28

memberikan kepastian hukum pada upaya memberantas tipikor, dengan pemberian hukuman perampasan pada terdakwa. Dengan demikian, kepastian hukum juga dapat terjadi dalam pengembalian kerugian negara akibat tipikor.

D. Simpulan

Penerapan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilakukan dalam dua cara. Pertama melalui jalur tuntutan pidana. Konsep tersebut disebut dengan perampasan aset sesuai dengan kesalahan pelaku. Kedua, dari gugatan perdata.

Idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang yaitu dari disahkannya RUU Perampasan Aset. Sebab Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkokoh sistem hukum melalui peyitaan aset tanpa putusan pengadilan dengan sistem *Non Conviction Based Forfeiture*. Mekanisme dalam sistem ini yaitu dapat menyita seluruh kekayaan yang dicurigai hasil dari kejahatan korupsi serta aset yang lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat tindak pidana, terkhusus yang masuk pada kelompok kejahatan sangat berat.

Daftar Pustaka

Buku

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. (1992). *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.

PAF Lamintang dan Theo Larnintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dkk. Ramelan. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM*. Jakarta.

Laila Efi Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing.

Syamsudin Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Achjani Eva Zulfa. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut, Bogor*. Ghalia Indonesia.

Nasution Bismar. (2008). *Rezim Anti Money Loundering Di Indonesia*. Bandung : Books Terrace & Library.

Husein Yunus. (2008). "Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi". Semarang, 21-22.

Yusuf Muhammad, (2013). *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Kompas.

Artikel Jurnal

Ridwan Arifin. "ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERAMPASAN ASET DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DAN *ASEAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (AMLAT)*". Jurnal Penelitian Hukum. Volume 3. Nomor 1. Maret 2016.

Marfuatul Latifah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Jurnal Negara Hukum. Volume 6. Nomor 1. Juni 2015.

Deypend Tommy Sibuea, R.B Sularto, Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Diponegoro Law Review. Volume 5. Nomor 2. 2016.

Rizi Rizki Deli. "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang". *Lex Administratum*. Volume IV. Nomor 4. April 2016.

Try Putra D. N. Kuku. "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Volume IX. Nomor 4. Oktober-Desember 2020.

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum PRIORIS*. Volume 6. Nomor 1. Tahun 2017.

Imelda F.K. Bureni. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Masalah - Masalah Hukum*. Jilid 45. Nomor 4. Oktober 2016.

Maggie Regina Imbar. "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Crimen*. Volume IV. Nomor 1. Januari-Maret 2015.

Kausar Dwi Kusuma. "Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*". *Jurnal*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Malang, 2013.

I Gusti Ketut Ariawan. "*Stolen Asset Recovery Initiative*, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara". *Kertha Patrika*. Volume 33, Nomor 1. Januari 2008.

Malto S. Datuan. "*Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang". *USU law journal*, Volume 5. Nomor 2. April 2017.

Andi Saputra. "Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*". *JOM Fakultas Hukum*. Volume V. 2 Oktober 2018.

Erwin Ogi. "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan". *Lex et Societatis*. Volume III. Nomor 4. Mei 2015.

Agus Pranoto. "Kajian yuridis mengenai perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Legalitas*. Volume X. Nomor 1. Juni 2018.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Beni Harmoni Harefa. "Upaya Pengembalian Aset Negara (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri". (Tesis). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2011.

Pidato

Mardjono Reksodiputro, "Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, *Legal Opinion* (sebagai narasumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset), Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.

Stefan D. Cassela, "*The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*", disampaikan di *25th Cambridge International Symposium on Economic Crime*, 7 September 2007.

Internet

Achmad Nasrudin Yahya. *PolriSita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>. Diakses atau Diunduh Pada Tanggal 11 Oktober 2020.

Muhammad Syahrianto. *Kasus Korupsi Dirgantara Indonesia, KPK Sita Aset Rp18,6 Miliar*, <https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186-miliar>. diakses tanggal 23 Oktober 2020.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>. diakses tanggal 6 Desember 2020.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>. diakses tanggal 6 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Conventions of Against Corruption.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3.